KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen
Vol.3, No.10 Oktober 2025
e-ISSN: 3025-7859; p-ISSN: 3025-7972, Hal 503-514
DOI: https://doi.org/10.61722/jiem.v3i10.6847

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, PENGANGGURAN, DAN EKSPOR TERHADAP KEMISKINAN

Febriana Krisdayanti Barus
Universitas Negeri Medan
Joko Suharianto
Universitas Negeri Medan
Alamat: Jalan Willem Iskandar, Pasar V Medan Estate
Korespondensi penulis: fbrianakrsbarus@gmail.com

Abstrak. *This study analyzes the simultaneous and partial effects of government expenditure, unemployment rate, and exports on poverty in North Sumatra Province during the period 2001 to 2021. Poverty is a serious problem that continues to be a challenge in every country, even in developed countries, and these crucial economic factors need to be studied comprehensively for effective policy formulation. Secondary data are sourced from the Central Statistics Agency (BPS) of North Sumatra Province and analyzed using the Ordinary Least Square (OLS) multiple regression method. The results of the simultaneous test (F test) show that the variables of government expenditure, unemployment, and exports together have a significant effect on the poverty rate in North Sumatra, with an F-statistic probability value of 0.000000 <0.05. The results of the partial test (t test) reveal the following findings: Government expenditure has a negative effect on poverty, but the effect is not significant. This indicates that although the budget is allocated, the effectiveness of the program and its targeted allocation still need to be improved in order to have a real impact on poverty reduction. The unemployment rate does not show a significant positive effect on poverty. These findings imply the presence of other, more dominant factors in determining poverty levels, such as access to economic resources and unequal income distribution. On the other hand, exports show a significant negative effect on poverty, with a probability of 0.0056 < 0.05. This confirms the important role of export sector growth—especially in the plantation and manufacturing sectors—in creating jobs and increasing public incomes, thus reducing poverty. Overall, this study confirms the need for a multidimensional approach in designing economic policies to address poverty.*
Keywords: Poverty, Government Expenditure, Unemployment, Exports, North Sumatra.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pengaruh simultan dan parsial dari pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran, dan ekspor terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2001 hingga 2021. Kemiskinan merupakan masalah serius yang terus menjadi tantangan di setiap negara, bahkan di negara maju , dan faktor-faktor ekonomi krusial ini perlu dikaji secara komprehensif untuk perumusan kebijakan yang efektif. Data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan dianalisis menggunakan metode regresi berganda Ordinary Least Square (OLS). Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan ekspor secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara, dengan nilai probabilitas F-statistik 0.000000 < 0.05. Adapun hasil uji parsial (uji t) mengungkapkan temuan sebagai berikut: Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun anggaran dialokasikan, efektivitas program dan alokasi yang tepat sasaran masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan. Tingkat pengangguran tidak menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini menyiratkan adanya faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan tingkat kemiskinan, seperti akses terhadap sumber daya ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan.Di sisi lain, ekspor menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, dengan probabilitas 0.0056 < 0.05. Hal ini menegaskan peran penting pertumbuhan sektor ekspor—terutama pada sektor perkebunan dan industri pengolahan—dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk menekan angka kemiskinan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan multidimensional diperlukan dalam merancang kebijakan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan.
Kata Kunci: Kemiskinan , Pengeluaran Pemerintah , Pengangguran , Ekspor , Sumatera Utara.

Received Agustus 30, 2025; Revised September 30, 2025; Oktober 27, 2025
* Febriana Krisdayanti Barus, fbrianakrsbarus@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi masalah serius disetiap negara, bahkan di negara maju dan makmur sekalipun tetap ada kelompok masyarakat miskin. Meski kemiskinan takkan pernah terhapus, namun kemiskinan tak bisa dibiarkan karena kemiskinan disinyalir dapat menimbulkan banyak masalah lainnya seperti kejahatan sosial dan multiplier efek lainnya.

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Menurut Supriatna (1997), kemiskinan adalah situasi serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan, dimana penduduk mengalami keterbatasan akses pada faktor produksi, kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Fenomena kemiskinan di Sumatera Utara menunjukkan beberapa karakteristik penting. Terjadi penurunan persentase penduduk miskin secara bertahap dari sekitar 15-16% pada awal 2000-an menjadi sekitar 8-9% di tahun 2021. Namun, penurunan ini tidak konsisten dan mengalami fluktuasi, terutama saat krisis ekonomi seperti kenaikan BBM tahun 2005-2006 dan pandemi COVID-19 pada 2020-2021 yang menyebabkan kenaikan angka kemiskinan. Kemiskinan di Sumatera Utara juga menunjukkan disparitas spasial yang signifikan dengan tingkat kemiskinan di perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Ketimpangan antar kabupaten/kota juga terlihat jelas, dimana daerah pesisir barat dan kabupaten pedalaman umumnya memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan Medan dan sekitarnya.

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Utara:

1. Pengeluaran Pemerintah
   Alokasi anggaran pemerintah untuk program-program pembangunan, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial langsung, memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan. Efektivitas pengeluaran pemerintah dalam menjangkau kelompok miskin menentukan keberhasilan program pengentasan kemiskinan.
2. Tingkat Pengangguran
   Pengangguran menyebabkan hilangnya sumber pendapatan masyarakat, yang berdampak pada berkurangnya daya beli dan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan degradasi keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.
3. Kinerja Ekspor
   Aktivitas ekspor regional berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan devisa. Sektor ekspor yang berkembang dapat menciptakan efek

multiplier dalam perekonomian melalui keterkaitan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Menurut Mangkoesoebroto (2001), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang-barang publik.

Secara teoritis, pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan. Peningkatan pengeluaran pemerintah, terutama untuk program-program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program bantuan sosial langsung, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan.

Penelitian Yulsa & Sari (2022) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia, namun penelitian Ketaren (2018) menemukan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Sumatera Utara tidak selalu signifikan. Gap penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang secara spesifik menganalisis efektivitas alokasi dan distribusi pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara dalam periode paska-krisis ekonomi dan pandemi COVID-19 (2001-2021). Terdapat kebutuhan untuk mengidentifikasi apakah peningkatan pengeluaran pemerintah benar-benar efektif mencapai kelompok sasaran atau mengalami kebocoran anggaran dan misalokasi yang mengurangi dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan.

Pengangguran adalah keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Menurut Sukirno (2006), pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.

Pengangguran memiliki hubungan positif dengan kemiskinan. Tingginya tingkat pengangguran mengakibatkan banyak anggota masyarakat tidak memiliki pendapatan tetap, sehingga mengurangi daya beli dan berpotensi meningkatkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, pengangguran yang berkepanjangan dapat menyebabkan degradasi keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, sehingga semakin menyulitkan mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sementara penelitian lain menemukan bahwa pengaruhnya tidak signifikan atau bahkan lemah. Gap penelitian yang teridentifikasi adalah kurangnya analisis mendalam mengenai mengapa hubungan antara pengangguran dan kemiskinan di Sumatera Utara tidak selalu signifikan sebagaimana yang diprediksi teori. Terdapat kemungkinan bahwa sektor informal yang besar di Sumatera Utara menyediakan alternatif sumber pendapatan bagi pengangguran formal, sehingga mengurangi dampak langsung pengangguran terhadap kemiskinan. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut

mengenai jenis pengangguran (terbuka, setengah pengangguran, atau pengangguran terselubung) dan kualitas pekerjaan yang tersedia, karena keberadaan pekerjaan dengan upah rendah (working poor) dapat menjelaskan mengapa penurunan pengangguran tidak serta-merta mengurangi kemiskinan.

Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri.Menurut Amir M.S (2004), ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditas dari dalam negeri kepada negara asing dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing, serta melakukan komunikasi dengan bahasa asing. Dalam konteks regional, ekspor Sumatera Utara mencakup penjualan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan hasil pertanian lainnya ke pasar internasional.

Secara teoretis, peningkatan ekspor berpotensi mengurangi kemiskinan melalui beberapa jalur. Pertama, ekspor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja. Kedua, ekspor dapat meningkatkan pendapatan devisa negara yang dapat digunakan untuk membiayai impor barang modal dan investasi. Ketiga, sektor ekspor yang berkembang dapat menciptakan efek multiplier dalam perekonomian melalui keterkaitan ke depan dan ke belakang dengan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Gap penelitian yang teridentifikasi adalah terbatasnya kajian empiris yang menganalisis mekanisme transmisi pengaruh ekspor terhadap kemiskinan di Sumatera Utara, terutama mengingat struktur ekspor regional yang didominasi oleh komoditas primer seperti kelapa sawit dan karet. Pertanyaan yang belum terjawab adalah apakah pertumbuhan sektor ekspor berbasis perkebunan di Sumatera Utara memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin melalui penciptaan lapangan kerja, atau justru menciptakan ketimpangan karena kepemilikan lahan yang terkonsentrasi dan rendahnya nilai tambah produk ekspor. Selain itu, terdapat gap mengenai analisis volatilitas harga komoditas ekspor dan dampaknya terhadap stabilitas pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor ekspor. Penelitian ini perlu mengisi kekosongan dengan mengkaji apakah pertumbuhan ekspor di Sumatera Utara bersifat pro-poor growth atau justru ekslusif, serta bagaimana guncangan eksternal (seperti fluktuasi harga komoditas global) mempengaruhi hubungan antara ekspor dan kemiskinan dalam periode 2001-2021 yang mencakup berbagai krisis ekonomi global.

Kemenarikan Penelitian

Berdasarkan data penelitian mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah, Pengangguran, Ekspor terhadap persentase penduduk miskin, menarik karena mengkaji tiga variabel ekonomi krusial secara simultan, memberikan pemahaman komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dari berbagai dimensi ekonomi. Pendekatan multidimensi ini menjanjikan temuan yang lebih holistik dibandingkan penelitian yang hanya berfokus pada satu variabel, sehingga dapat memberikan landasan empiris yang lebih kuat bagi pengambilan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara periode 2001-2021?

2. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara periode 2001-2021?
3. Bagaimana pengaruh ekspor terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara periode 2001-2021?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan ekspor secara simultan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara periode 2001-2021?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara periode 2001-2021.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara periode 2001-2021.
3. Untuk menganalisis pengaruh ekspor terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara periode 2001-2021.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan ekspor secara simultan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara periode 2001-2021.

KAJIAN TEORI

Teori Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi fokus kajian ekonomi pembangunan sejak lama. Secara umum, terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan fenomena kemiskinan:

1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (Vicious Circle of Poverty) Dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, teori ini menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima, sehingga menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi, yang berakibat pada rendahnya akumulasi modal dan begitu seterusnya.
2. Teori Kemiskinan Absolut Teori ini mendefinisikan kemiskinan dalam kaitannya dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan. Menurut teori ini, seseorang dikategorikan miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum tersebut.
3. Teori Kemiskinan Relatif Teori ini mendefinisikan kemiskinan dalam hubungannya dengan kondisi sosial sekitarnya. Seseorang mungkin tidak termasuk dalam kategori miskin absolut, tetapi jika pendapatannya jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat sekitarnya, maka ia dapat dikategorikan miskin secara relatif.
4. Teori Kemiskinan Struktural Teori ini memandang kemiskinan sebagai akibat dari struktur sosial yang tidak adil, dimana sebagian masyarakat tidak memiliki akses

yang sama terhadap sumber daya ekonomi. Kemiskinan struktural lebih disebabkan oleh ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan

Teori Pengeluaran Pemerintah

1. Teori Keynes John Maynard Keynes menekankan pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian, terutama melalui kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah dan perpajakan). Menurut Keynes, pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
2. Teori Wagner (Hukum Wagner) Adolf Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian yang sedang berkembang, pengeluaran pemerintah akan semakin besar karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.
3. Peacock dan Wiseman Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Menurut mereka, pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Menurut mereka, pengeluaran pemerintah cenderung meningkat secara "berjenjang" (steplike) dan bukan secara linear.

Teori Pengangguran

1. Teori Pengangguran Klasik Menurut ekonom klasik, pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja, terutama karena kekakuan upah. Pengangguran dapat diatasi dengan menurunkan upah, sehingga permintaan tenaga kerja meningkat.
2. Teori Pengangguran Keynesian Keynes berpendapat bahwa pengangguran terjadi karena kurangnya permintaan agregat di perekonomian. Menurutnya, pengangguran dapat diatasi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mendorong permintaan agregat.
3. Teori Pengangguran Struktural Teori ini menyatakan bahwa pengangguran terjadi akibat perubahan struktur ekonomi, misalnya perubahan teknologi atau pergeseran sektor ekonomi, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja

Kerangka Teoretik

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, kerangka teoretik dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Peningkatan pengeluaran pemerintah, terutama untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program bantuan sosial, diharapkan dapat meningkatkan akses

masyarakat terhadap layanan dasar, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan.

2. Pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Peningkatan pengangguran menyebabkan banyak anggota masyarakat tidak memiliki pendapatan tetap, sehingga mengurangi daya beli dan berpotensi meningkatkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
3. Ekspor berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Peningkatan ekspor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan.
4. Pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan ekspor secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Ketiga variabel tersebut secara simultan mempengaruhi tingkat kemiskinan melalui berbagai mekanisme dan jalur transmisi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan kepada masalah kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, dimana pembahasan dalam penelitian ini mencakup beberapa variabel seperti: pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan ekspor di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara tahun 2001 – 2021.

Fungsi-fungsi yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

PMIS = f (PGG, INF) .....(1)

Dari persamaan 1, dispesifikasikan kedalam model dan ditransformasikan keadalam bentuk logaritma pada persamaan sebagai berikut:

$L(PMIS) = \beta o + \beta 1\ L(PGL) + \beta 2\ L(INF) + \beta 3\ L(EKS)\ e$ .....(2)

Keterangan:

PMIS = Penduduk Miskin (Orang)
PGL = Pengeluaran (Milyar)
PGG = Pengangguran (Orang)
EKS = Ekspor (Milyar)
L = Logaritma
Bo = Konstanta
β1-β2- β3 = Koefisien regresi
e = Variabel gangguan (error term)]

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Adapun uji asumsi yang digunakan yakni uji normalitas, uji autokorelasi, multikolinearity dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Hasil penelitian ini mengkaji pengaruh parsial, pengaruh simultan dan koefisien determinasi. Seluruh pengolahan data penelitian ini menggunakan alat analisis Eviews 12.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

UJI ASUMSI KLASIK

a) Uji Normalitas

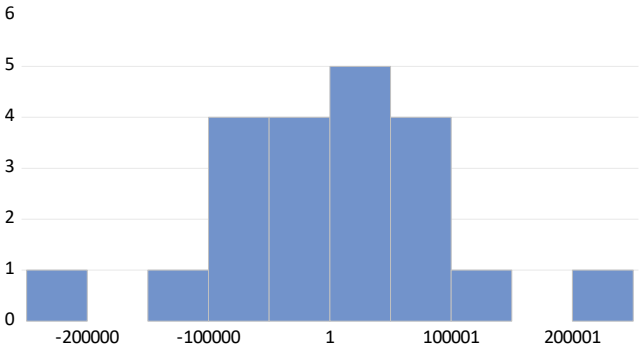

Series: Residuals	
Sample 2001 2021	
Observations 21	
Mean	4.85e-11
Median	4644.715
Maximum	202453.7
Minimum	-203081.6
Std. Dev.	89613.26
Skewness	-0.027899
Kurtosis	3.395195
Jarque-Bera	0.139381
Probability	0.932682

Dikarenakan nilai prob. Jarque Bera 0.932682 > 0.05, maka Ho Diterima. Maka dari itu tidak terdapat pelanggaran dalam uji normalitas.

b) Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.844857	Prob. F(2,15)	0.4491
Obs*R-squared	2.126100	Prob. Chi-Square(2)	0.3454

Dikarenakan nilai prob. Chi square 0.3454 > 0.05 , maka dalam hal ini Ho diterima. Artinya tidak terdapat pelanggaran autokorelasi pada model penelitian.

c) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.632240	Prob. F(3,17)	0.6043
Obs*R-squared	2.107832	Prob. Chi-Square(3)	0.5503
Scaled explained SS	1.654269	Prob. Chi-Square(3)	0.6471

Dikarenakan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai Prob. Chi-Square > 0.05 maka dalam hal ini Ho diterima. Artinya tidak terdapat pelanggaran heteroskedastisitas pada model penelitian.

d) Uji Multikolinearity

Variance Inflation Factors
Date: 10/08/25 Time: 17:54
Sample: 2001 2021
Included observations: 21

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF

C	1.13E+10	25.13652	NA
X1	0.009371	12.35365	4.233286
X2	0.037043	18.66780	1.135909
X3	0.000111	22.19727	3.967393

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas, Dikarenakan nilai VIF < 10 , maka dalam hal ini Ho diterima. Artinya tidak terdapat pelanggaran autokorelasi pada model penelitian.

UJI HIPOTESIS

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 10/08/25 Time: 17:55
Sample: 2001 2021
Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1891146.	106342.2	17.78358	0.0000
X1	-0.183447	0.096803	-1.895056	0.0752
X2	0.146753	0.192465	0.762493	0.4562
X3	-0.033432	0.010542	-3.171259	0.0056

R-squared	0.857150	Mean dependent var	1557127.
Adjusted R-squared	0.831941	S.D. dependent var	237100.2
S.E. of regression	97199.23	Akaike info criterion	25.97656
Sum squared resid	1.61E+11	Schwarz criterion	26.17551
Log likelihood	-268.7538	Hannan-Quinn criter.	26.01974
F-statistic	34.00193	Durbin-Watson stat	1.312142
Prob(F-statistic)	0.000000		

a) Uji Simultan

Dari hasil uji hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variable pengeluaran pemerintah, pengangguran dan ekspor dengan kemiskinan. Hal ini mengacu pada table output uji hipotesis yang memaparkan nilai Fhitung sebesar 34.00193 > Ftabel 3.20. Selain itu, nilai signifikansinya juga menunjukkan nilai probabilitas 0.000000 < 0.05. Artinya variable bebas secara simultan mempengaruhi variable terikat.

b) Uji Parsial

1. Terdapat pengaruh negative signifikan antara variable pengeluaran pemerintah terhadap variable kemiskinan . Hal ini mengacu pada t hasil uji hipotesis yang mengemukakan nilai thitung sebesar 1.895056 yang mana lebih besar daripada ttabel (1,73961). Selain itu, nilai signifikansi juga menunjukkan prob. 0.0752 < 0.05.
2. Tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara variable pengangguran terhadap variable kemiskinan. Hal ini mengacu pada hasil uji hipotesis yang mengemukakan

nilai thitung sebesar 0.192465 yang mana lebih kecil daripada ttabel (1,73961). Selain itu, nilai signifikansi juga menunjukkan prob 0.4562 > 0.05.

3. Terdapat pengaruh negatif signifikan antara variable laju pertumbuhan ekonomi terhadap variable kemiskinan. Hal ini mengacu pada table ooutput hasil uji hipotesis yang mengemukakan nilai thitung sebesar 3.171259 yang mana lebih besar daripada ttabel (1,73961). Selain itu, nilai signifikansi juga menunjukkan prob. 0.0056 < 0.053)

c) Koefisien Determinasi

Makna nilai R adjusted squared diperoleh nilai sebesar 0.857150 Artinya, sebesar 85,71% variable independent dapat dijelaskan oleh variable dependen. Sementara itu 14,29 dijelaskan oleh variable lain. Dalam hal ini, pengaruh variable bebas terhadap variable terikat adalah sebesar 85,71%. Sebagaimana telah dijelaskan, sisanya dipengaruhi oleh variable lain diluar penelitian.

d) Interpretasi Model Analisis Regresi Penelitian

Berdasarkan Tabel di atas diketahui persamaan regresi model penelitian yang terbentuk sebagai berikut:

$L(PMIS) = \beta o + \beta 1\ L(PGL) + \beta 2\ L(INF) + \beta 3\ L(EKS)\ e$ .....(2)

Keterangan:

PMIS = Penduduk Miskin (Orang)
PGL = Pengeluaran (Milyar)
PGG = Pengangguran (Orang)
EKS = Ekspor (Milyar)
L = Logaritma
βo = Konstanta
β1-β2- β3 = Koefisien regresi
e = Variabel gangguan (error term)]

Berikut adalah interpretasi persamaan regresi di atas:

1. Variabel secara menyeluruh
   Diperoleh nilai koefisien konstanta sebesar 1891146 artinya bahwa jika variabel bebas yaitu pengeluaran, pengangguran dan ekspor dianggap konstan, maka presentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara minus 1891146%.
2. Variabel Pengeluaran
   Diperoleh nilai koefisien regresi variabel bebas pengeluaran sebesar 0.183447. Artinya bahwa apabila pengeluaranaik sebesar 1 persen, maka presentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.183447% dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap. Koefisien bernilai negatif mengartikan bahwa terdapat hubungan negatif antara pengeluaran terhadap presentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Semakin tinggi pengeluaran, maka presentase penduduk miskin akan menurun.
3. Variabel Pengangguran
   Diperoleh nilai koefisien regresi variabel bebas pengangguran sebesar 0.146753. Artinya bahwa apabila nilai pengangguran naik sebesar 1 persen, maka presentase

penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.146753 % dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap.

4. Variabel ekspor

   Diperoleh nilai koefisien regresi variabel bebas laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.033432. Artinya bahwa apabila nilai jumlah industri naik sebesar 1 persen, maka presentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.033432% dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap. Koefisien bernilai negatif mengartikan bahwa terdapat hubungan negatif laju pertumbuhan ekonomi terhadap presentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, maka p presentase penduduk miskin akan menurun.

e) Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan, meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, efektivitas program masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan.Kurangnya alokasi yang tepat dan kebocoran anggaran dapat menjadi faktor yang menghambat efektivitas pengeluaran pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Sementara itu, tingkat pengangguran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan dalam penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pengangguran meningkat, terdapat faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan tingkat kemiskinan, seperti akses terhadap sumber daya ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan. Kebijakan yang hanya berfokus pada penurunan angka pengangguran tanpa memperhatikan aspek lain, seperti kualitas pekerjaan dan upah yang layak, tidak akan efektif dalam mengurangi kemiskinan secara substansial.

Di sisi lain, ekspor menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ekspor dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Peningkatan ekspor terutama pada sektor perkebunan dan industri pengolahan dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam menekan angka kemiskinan di Sumatera Utara. Namun, volatilitas harga komoditas di pasar internasional tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi dengan strategi diversifikasi produk dan penguatan daya saing industri lokal.

Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran, dan ekspor secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang terpisah, melainkan harus dilakukan secara holistik dengan memperhitungkan berbagai faktor ekonomi yang saling berkaitan. Kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemiskinan harus melibatkan kombinasi strategi yang mencakup peningkatan efektivitas pengeluaran

pemerintah, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, serta peningkatan daya saing sektor ekspor.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan multidimensional diperlukan dalam merancang kebijakan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan, mengembangkan strategi ketenagakerjaan yang lebih inklusif, serta memperkuat sektor ekspor agar dapat memberikan kontribusi maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, tetapi tidak signifikan, yang mengindikasikan perlunya efektivitas dalam alokasi dana publik agar dapat lebih tepat sasaran. Tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, menunjukkan bahwa faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi dan kebijakan sosial lebih menentukan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Sementara itu, ekspor memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, menegaskan bahwa pertumbuhan sektor ekspor dapat membantu dalam pengurangan tingkat kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Secara simultan, pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan ekspor berpengaruh terhadap kemiskinan, yang menekankan pentingnya pendekatan kebijakan yang terintegrasi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penelitian ini menyarankan agar pemerintah meningkatkan efektivitas pengeluaran publik, terutama pada sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat miskin, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan. Selain itu, strategi pengurangan pengangguran harus difokuskan pada peningkatan keterampilan tenaga kerja dan akses pasar kerja agar tenaga kerja lebih kompetitif. Selanjutnya, daya saing sektor ekspor perlu diperkuat melalui diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah. Terakhir, kebijakan ekonomi harus dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan hubungan antara pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan ekspor agar dapat lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara. Mangkoesoebroto, G. (2001). Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE UGM. Yulsa, R., & Sari, M. (2022).

Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Indonesia 2021. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. (2021). Laporan Sosial Ekonomi Sumatera Utara. Medan: BPS Sumatera Utara. Hasan, I. (2002).

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Skylandsea, 22(1), 15-25.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia. Media Ekonomi dan Perbankan, 10(3), 602-609. Ketaren, I. C. (2018).